

## Gerakan Buruh Di Indonesia Dalam Analisis Teori Perjuangan Kelas Karl Mark

Rahma Syafitri

Dosen Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang  
Email : [rahmasyafitri@umrah.ac.id](mailto:rahmasyafitri@umrah.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

*Article history:*

Dikirim tanggal: 27 November 2019

Revisi pertama tanggal: 28 November 2019

Diterima tanggal: 28 November 2019

Tersedia *online* tanggal: 29 November 2019

### ABSTRACT

Peringatan hari buruh internasional merupakan moment yang selalu dimanfaatkan oleh gerakan buruh untuk melakukan perjuangan untuk kepentingan kesejahteraan buruh diseluruh kalangan. Di Indonesia sendiri setiap adanya peringatan hari buruh dilakukan aksi demonstrasi damai yang dilakukan oleh semua buruh untuk menyuarakan tuntutan tentang perbaikan kehidupan mereka. Upaya ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Karl Mark bahwasanya perjuangan kelas harus dilakukan oleh buruh sebagai bagian dari kelas ploretat. Perjuangan kelas diperuntukkan agar ada *bargaining position* sehingga kesenjangan antara kelas atas dengan kelas bawah semakin hilang dan mencapai harapan yaitu tiada perbedaan kelas.

**Kata Kunci:** Buruh , Perjuangan Kelas, Kesejahteraan

## PENDAHULUAN

Hari Buruh hampir selalu diperingati dengan sejumlah aksi. Aksi buruh tidak hanya mengkritisi kebijakan mikro perusahaan tetapi juga regulasi ketenagakerjaan yang ada. Sekalipun tuntutan buruh pada Hari Buruh tidak selalu terpenuhi tetapi aksi-aksi buruh mampu memberikan wacana bahwa buruh merupakan salah satu aktor produksi dan politik yang patut diperhitungkan dalam arena politik resmi. Hari Buruh dan aksi buruh telah mampu menjadi embrio bagi pencerahan nasib buruh. Pada tahun 2013 pada hari buruh tanggal 1 November ada aksi mogok buruh di seluruh Indonesia.

Tuntutan utamanya meminta adanya pemberian upah buruh yang lebih baik dan penghapusan pekerja kontrak. Berdasarkan analisis teori perjuangan kelas Karl Mark maka aksi buruh dalam mogok nasional merupakan upaya memperjuangkan nasib buruh agar keberadaan mereka didengar dan bisa mengupayakan kehidupan yang lebih baik.

### Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia

Data BPS per Februari 2013 menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,92 persen. Padahal, angka ini telah menurun dibanding Agustus 2012 sebesar 6,14 persen, dan Februari 2012 sebesar 6,32 persen. Sementara, jumlah angkatan

kerja di Indonesia pada periode Februari 2013 mencapai 121,2 juta orang, atau bertambah sebanyak 3,1 juta orang dibanding Agustus 2012 sebanyak 118,1 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2013 mencapai 114,0 juta orang, atau bertambah 3,2 juta orang dibanding Agustus 2012 sebanyak 110,8 juta orang (BPS 2013). Selama setahun terakhir (Februari 2012-Februari 2013), jumlah penduduk yang bekerja meningkat.

Terutama disektor perdagangan sebanyak 790 ribu orang (3,29 persen), konstruksi 790 ribu orang (12,95 persen), serta industri 570 ribu orang (4,01 persen). Selanjutnya, sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah pertanian dan lainnya. Jumlah penduduk bekerja masing-masing turun 3,01 persen dan 5,73 persen (BPS 2013). Sedangkan data jenjang pendidikan yang diperoleh pekerja Pada Februari 2013 sebagai berikut, penduduk bekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi, yaitu sebanyak 54,6 juta orang (47,90 persen).

Sementara itu, penduduk bekerja dengan pendidikan diploma sebanyak 3,2 juta orang (2,82 persen), dan penduduk bekerja dengan pendidikan universitas hanya 7,9 juta orang (6,96 persen) (BPS 2013). Kemudian data statistik di atas menggambarkan jumlah ketegakerjaan Indonesia saat ini yang berjumlah 114,0

juta orang yang bersatus pekerja. Dari seluruh pekerja tersebut semuanya merupakan kaum buruh. Namun buruh yang sering melakukan aksi mogok kerja dan melakukan aksi turun kejalan biasanya dari kalangan industri. Karena berdasarkan beberapa pemberitaan di media para buruh ini turun kejalan karena upah yang belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga buruh.

Apalagi sekarang perusahaan yang melaksakan perekrutan pekerja kontrak yang upahnya juga semakin murah. Oleh sebab itu setiap tahun para buruh berupaya agar suara mereka di dengar oleh para pengusaha dan pengambil kebijakan dengan selalu mengadakan aksi buruh Nasional pada hari buruh Internasional yaitu pada tanggal 1 November. Aksi mogok buruh Nasional akan sangat terlihat dampaknya pada kota-kota yang memiliki industri yang besar. Kota-kota besar pada hari itu akan sangat macet karena para buruh mogok dari semua tempat kerjanya atau bahkan memang ada perusahaan yang memberikan hari cuti bagi para buruh untuk ikut dalam aksi demonstrasi.

Berdasarkan berita-berita lewat media online seperti Vivanews, Kompas.com dan Liputan 6.com, kota Jakarta dipenuhi kaum buruh pada peringatan hari buruh Internasional yang diperingati pada tanggal 1 November setiap tahunnya. Walaupun kota-kota

besar lain juga mengadakan aksi mogok yang sama, tapi jumlah massa terbesar kaum buruh berada di Jabodetabek yang merupakan kawasan industri terbesar di Indonesia.

### **Hubungan Industrial di Indonesia**

Dasar dari hubungan industrial adalah adanya suatu perjanjian kerja. Kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja inilah yang menimbulkan suatu hubungan kerja. Hubungan kerja terjadi setelah diadakan perjanjian anatara buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah (Yulianto: 2012 :104).

Menurut Iman Soepomo, hubungan kerja adalah hubungan suatu hubungan anatara seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja anatara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja/ buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha memperkerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah (Soepomo,1987).

Sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan hubungan antara pengusaha dengan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Perjanjian

kerja yang akan ditetapkan oleh pekerja/buruh dan pengusaha tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah dibuat oleh pengusaha dengan serikat pekerja/buruh atau peraturan perusahaan yang dibuat oleh pengusaha.

Perjanjian kerja adalah antar pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kepada seluruh pihak. Pada pasal 1601a KHUP perdata menyebutkan bahwa perjanjian kerja adalah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu yaitu buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan dengan upah selama waktu tertentu (Yulianto: 2012 :105). Hubungan kerja tidaklah terbatas hanya hubungan antara pekerja/ buruh dan pengusaha saja, tetapi perlu adanya campur tangan pemerintah.

Pemerintah sebagai regulator atau pembuat kebijakan yang mempunyai kepentingan dalam rangka untuk menciptakan hubungan industrial dalam rangka mencari keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Maka pada pelaksanaan hubungan industrial harus berdasarkan Undang-undang. Seperti yang tertulis pada pasal 1 angka 16 UU No.13 tahun 2003 Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang

dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja / buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkembangan dunia usaha sangat bergantung kepada adanya hubungan industrial yang baik, karena semakin baik hubungan industrial maka akan semakin baiknya perkembangan dunia usaha.

### **Fakta Sosial Tentang Perjuangan Buruh**

Berdasarkan berita dari VIVAnews, pada hari Kamis 31 Oktober 2013, sejumlah serikat pekerja memulai aksi mogok nasional. Aksi mogok itu direncanakan hingga 1 November 2013, dan menjadi rangkaian unjuk rasa buruh sejak awal pekan ini. Mereka menuntut kenaikan upah minimum, dan menghapuskan sistem kerja alih daya alias outsourcing. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, mereka meminta upah minimum Rp3,7 juta pada 2014.

Jika tuntutan itu dipenuhi, upah buruh bakal naik 68 persen, bila dibandingkan 2013 sebesar Rp2,2 juta. Tuntutan ini mereka nilai wajar, karena komponen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh di Jakarta saat ini setara Rp3,7 juta. Komponen hidup layak merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik, non fisik, maupun sosial selama sebulan. KHL kemudian ditetapkan

sebagai dasar dalam penetapan upah minimum.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DKI Jakarta, Winarso, mengatakan, aksi ini dilakukan setelah pengajuan angka KHL ditolak Dewan Pengupahan. Mereka mengklaim kenaikan yang diusulkan sudah sesuai penghitungan dan kebutuhan buruh. Dengan mogok nasional, dia mengklaim, akan terlihat eksistensi buruh sebagai suatu kelas yang punya peran di Indonesia. "Kami akan terus berjuang, kami tidak mau mati dalam kemiskinan," ucapnya. (Vivanews.com)

Upaya buruh untuk mendapatkan gaji yang lebih layak diwujudkan dalam aksi demo besar-besaran juga di beritakan oleh Liputan 6. Buruh kali ini sekitar 100 ribu buruh di Tangerang berencana melakukan unjuk rasa menuntut revisi upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang telah disahkan oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

*"Aksi akan dipusatkan pada sekitar pintu tol. Mulai dari di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang," kata perwakilan buruh, Koswara, di Tangerang, Banten, Selasa (3/12/2013).*

Koswara menuturkan, aksi akan dilakukan hingga kepala daerah mengeluarkan rekomendasi untuk merevisi UMK yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi buruh. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah telah menetapkan

UMK tahun 2014 dalam Surat Keputusan Gubernur Banten No 151/Kep.582-Huk/2013 tanggal 22 November 2013. Dalam surat keputusan Gubernur Banten tersebut, UMK 2014 Kabupaten Lebak ditetapkan Rp 1.490.000, Kota Serang Rp 2.166.000, Kabupaten Pandeglang Rp 1.418.000, Kota Tangerang Selatan Rp 2.442.000, Kabupaten Tangerang Rp 2.442.000, Kota Cilegon Rp 2.443.000, dan Kota Tangerang Rp 2.444.301 (Liputan 6.Com).

Selain itu unjuk rasa buruh juga di lakukan sehari sebelumnya, sekitar 100.000 buruh di seluruh kawasan industri Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Banten ikut terlibat dalam aksi ini. Aksi itu untuk menuntut revisi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) oleh Walikota Tangerang dan Bupati Tangerang "Diperkirakan ada 60 ribu buruh dari Kota Tangerang dan 40 ribu dari Kabupaten Tangerang.

Dimulai jam 7 pagi di wilayah industri masing-masing. Mogok daerah ini 3 hari, dari 3-5 Desember. Bila hingga tengah hari belum juga ada tanggapan dari pemerintah kota maupun kabupaten, ujar Sunarno, massa akan beralih menutup akses jalan Tol Tangerang-Merak. Tak hanya itu, akses jalan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga rencananya ikut ditutup sebagai bentuk protes para buruh," ungkap Koordinator Lapangan Aksi Mogok Daerah itu, Sunarno, saat berbincang dengan

Liputan6.com, Jakarta, Senin (2/12/2013) malam.

Ia mengatakan aksi ini merupakan yang ke-15 kali setelah para buruh terus berupaya menuntut dilakukannya revisi UMK Tangerang menjadi Rp 2.605.000 kepada Dewan Pengupahan, Disnaker, DPRD, bupati, dan walikota. Sebab nilai UMK yang ditetapkan pemerintah Tangerang pada 22 November 2013 lalu sebesar Rp 2.044.301 dianggap belum dapat memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), terutama untuk buruh di daerah tersebut.

Sunarno menuturkan, pihaknya awalnya menuntut UMK setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara nasional yaitu Rp 3,7 juta. Namun kemudian diturunkan menjadi Rp 3,1 juta. Hanya, baik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) maupun pemerintah Tangerang tidak juga memberi respons atas tuntutan tersebut. Buruh lalu melakukan diskusi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tangerang dan nilai Rp 2,6 juta pun keluar sebagai angka UMK yang akan dituntut.

*"Itu nilai yang menurut kami masih realistis. KHL Kota Tangerang itu Rp 2.310.000. Nah, kalau ditambah dengan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 16,88 persen, maka angka yang paling sesuai itu ya Rp 2,6 juta," jelasnya.*

Berita dari Kompas.com juga menggambarkan aksi gerakan buruh memperjuangkan hak-hak kaum pekerja

harus bebas dari kekerasan dan intimidasi. Aksi serikat buruh berjalan tertib tanpa penyisiran pabrik di dalam kawasan industri untuk memaksa buruh yang bekerja supaya ikut berunjuk rasa. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir menegaskan hal ini di Gedung Joang 45 di Jakarta, Senin (11/11/2013). Andi mengklaim KSPSI memiliki sedikitnya 3,7 juta anggota dan Mudhofir mengklaim KSBSI beranggotakan 1 juta buruh.

Mudhofir mengatakan, sebagai komitmen dan solidaritas, KSBSI menghargai mogok nasional. Namun, dia menyayangkan masih ada aksi intimidasi anggota serikat buruh lain terhadap anggota KSBSI dalam setiap unjuk rasa. Presiden KSPI Said Iqbal, dalam siaran persnya, meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama tidak bersikap arogan dan ragu untuk merevisi kenaikan upah minimum provinsi 2014 sebesar Rp 2,4 juta.

Padahal dua Gubernur DKI sebelumnya, yaitu Fauzi Bowo dan Sutiyoso, pernah merevisi penetapan UMP. Bahkan, Fauzi Bowo yang anti-perubahan pernah merevisi penetapan UMP sampai dua kali. Menurut Iqbal, saat ini, buruh tidak lagi meminta angka kenaikan Rp 3,7 juta, tetapi angka berkisar Rp 3 juta (Kompas.com). Dari

berbagai fenomena di atas yang dikabarkan oleh media massa memang menggambarkan upaya buruh untuk memperjuangkan kelas.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Perjuangan Kelas

Pandangan Marx yang dianggap penting oleh pendukung aliran Marxisme adalah teori perjuangan kelas (*Struggle of Classess*)( Ismail & Bashir 2012). Sebenarnya, Marx bukanlah orang yang pertama melakukan kajian tentang konsep kelas-kelas sosial. Bertahun-tahun sebelumnya, para sejarawan borjuis telah melakukan kajian mengenai konsep tersebut. Di antara sejarawan itu yang terkemuka adalah Babeuf. Ia melakukan studi dalam konteks perjuangan kelas dan proses berkembangnya kapitalisme dalam masyarakat Eropa. Ia telah melakukan studi yang mendalam mengenai pertarungan antara kelas yang tertindas (mayoritas) dengan kelas kapitalis yang kaya (minoritas) ( Suhelmi. 2012).

Kelas merupakan sebuah konsep yang menentukan kedudukan sosial manusia dari segi kepemilikan benda atau harta yang tidak dapat dipisahkan dari konsep ekonomi. Kecenderungan Marx untuk menganalisis ide-ide tentang teori kelas ditonjolkan dalam bagian akhir karyanya yaitu *Das Capital*. Secara umum, konsep kelas sosial yang diutarakan oleh Marx telah diterjemahkan dalam versi sistem

ekonomi kapitalisme. Dalam karyanya tersebut, Marx telah membagi tiga kelas utama dalam struktur masyarakat kapitalis, yaitu kelas buruh upahan (*Wage Labourers*), kelas kapitalis, dan kelas pemilik tanah (*Landowner*).

Walau perkembangan struktur industri yang bersifat kapitalisme hanya memperkenalkan dua jenis kelas saja, yaitu borjuis dan proletar. Semua kelas buruh upahan akan diklasifikasikan sebagai kelas proletar. Sedangkan kelas kapitalis dan pemilik tanah dimasukkan dalam kelas borjuis. Namun kedua kelas yang diklasifikasikan dalam kelas borjuis tersebut bersaing ketat dalam memperoleh dan merebut keuntungan atau kekayaan. Dan mereka yang 'kalah' akan diletakkan di posisi kelas proletar.

Kelas proletar dan borjuis memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Kelas borjuis memiliki dan menguasai alat-alat produksi serta menguasai seluruh rangkaian sistem produksi, sedangkan kelas proletar dijadikan sebagai tenaga kerja yang bekerja untuk kelas borjuis dalam rangkaian proses produksi. Kelas proletar seringkali dianggap sebagai kelasnya orang-orang yang hanya memiliki tenaga kerja.

Mereka tak memiliki apapun selain tenaga yang mereka gunakan untuk bekerja. Sebagai imbalannya, mereka menerima gaji dari kaum borjuis dengan jumlah yang sangat rendah. Ini tentu saja tidak adil bagi mereka. Jurang perbedaan

antara kedua kelas inilah yang menyulut perjuangan dan penentangan antara kelas-kelas sosial. Marx menyebutkan bahwa sejarah manusia adalah sejarah pertentangan antara kelas yang menindas dan kelas yang tertindas. Ia mengatakan bahwa pertentangan tersebut kadang kala dapat dilihat secara tersembunyi, tetapi terkadang juga dapat berlaku dan dilihat secara terbuka.

Marx diasah oleh analisisnya yang semakin matang terhadap sistem kapitalisme dini di awal Revolusi Industri di Inggris. Marx menaruh perhatian yang mendalam terhadap fenomena dehumanisasi kaum pekerja, termasuk buruh perempuan dan anak-anak. Kelas buruh yang diperas tenaganya dengan imbalan upah yang jauh di bawah nilai jual komoditi yang dihasilkannya, sementara nilai lebih (surplus value) komoditi-komoditi yang dihasilkan oleh kaum buruh memperkuat sistem produksi kapitalis dan menguntungkan kaum borjuis (Kristeva : 2011).

Setelah menyadari bahwa sistem ekonomi merupakan pondasi, yang di atasnya superstruktur politik didirikan, Marx mencurahkan perhatiannya untuk mempelajari sistem ekonomi ini ( Sayyid dan Kristeva. 2011). *Das Capital*, karya Marx yang paling monumental telah membuktikan bahwa Marx adalah orang yang konsisten dalam studi mengenai sistem ekonomi modern, yakni kapitalisme, ekonomi politik klasik,

sebelum Marx, yang berkembang di Inggris, negeri yang paling maju saat itu (Sayyid dan Kristeva. 2011). Adam Smith dan David Richardo, dengan studi mendalamnya tentang sistem ekonomi, meletakkan dasar-dasar dari teori nilai kerja. Mereka menganggap bahwa nilai suatu komoditi ditentukan oleh kuantitas waktu kerja yang digunakan untuk memproduksi komoditi itu.

Eksplorasi terhadap kaum proletar sangat menarik perhatian Marx di mana buruh diharuskan bekerja dalam rentang waktu yang sangat lama dengan upah yang tidak sebanding dengan hasil kerjanya. Jika para ahli ekonomi borjuis melihat hubungan pertukaran antar komoditi Marx justru memperhatikan hubungan antar-manusia.

Modal (kapital) memperlihatkan sebuah fenomena hubungan yang menarik bagi Marx : tenaga kerja manusia menjadi sebuah komoditi. Para pekerja upahan menjual tenaganya kepada para pemilik tanah, pabrik, dan alat-alat kerja. Seorang pekerja menggunakan sebagian besar waktunya untuk bekerja demi menutupi biaya hidupnya dan keluarganya dengan upah yang sangat minim. Sedangkan sebagian waktunya yang lain digunakan untuk bekerja tanpa mendapat upah, semata-mata hanya mendatangkan nilai lebih untuk para pemilik modal.

Nilai lebih (surplus value) merupakan sumber keuntungan dan



sumber kemakmuran bagi kelas pemilik modal (kapitalis). Modal menjadi sesuatu yang menghantam para pekerja, menghancurkan para pemilik modal kecil, dan menciptakan banyak sekali kelompok pengangguran. Dalam bidang pertanian, misalnya, para petani yang tidak memiliki modal besar untuk membeli mesin pertanian yang canggih akan kalah bersaing dengan orang yang memiliki modal besar dan sanggup membeli mesin pertanian yang canggih.

Kondisi ini akan menghancurkan para pemodal kecil dalam kompetisi yang berbasis modal. Penurunan bahkan kehancuran pemodal kecil akan membuka peluang monopoli komoditi oleh para pemodal besar. Tak hayal, rakyat kecil akan semakin tertindas oleh kaum-kaum kapitalis. Kapitalisme telah menang di seluruh dunia. Tetapi kemenangan itu hanyalah menjadi sebuah awal dari kemenangan para pekerja terhadap penindasan modal yang membelenggu mereka. Dengan semakin kuatnya belenggu penindasan terhadap kelas proletar, Marx, dalam bukunya yang berjudul *Poverty of Philosophy*, menegaskan bahwa skenario eksploitasi kelas telah melahirkan unsur 'antagonisme kelas' yang merangsang keinginan para kaum proletar untuk bebas dari belenggu penindasan.

Keinginan untuk bebas dari penindasan tersebut menjadi penggerak utama mereka untuk membentuk sistem

sosial yang baru (Ismail & Bashir;2012). Kelas tersebut akan mendesak perubahan struktur sosial dengan cara-cara kekerasan dan kekejaman seperti perampasan kekuasaan secara revolusi (dengan cepat). Ini merupakan harapan Marx agar kelas proletar menjadi kelas penguasa apabila mampu merampas kekuasaan dan kedudukan kelas borjuis dan memusatkan seluruh peralatan-peralatan produksi dalam tangan kaum proletar.

Sistem sosial baru yang akan didirikan kaum proletar tidaklah sama seperti kelas feodalisme atau kapitalisme. Kaum proletar, justru sebaliknya, akan mengimplementasikan sebuah kondisi sosial yang tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas merupakan manifestasi dari perjuangan kaum proletar untuk menghapus jurang pemisah di antara kelas sosial. Dengan terwujudnya kondisi tersebut, sistem kekuasaan tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk menindas suatu golongan masyarakat. Perjuangan kelas seperti itu hanyalah berakhir melalui penghapusan sistem kapitalisme dan terwujudnya masyarakat tanpa kelas (komunisme).

Kaum buruh sebagai kaum proletar untuk memenangkan revolusi sosialis salah satu syarat pokok menurut dalil Marxis adalah mayoritas daripada penduduk harus terdiri atas proletariat. Dan oleh sebab itu, di negeri di mana proletariat belum cukup berkembang dan

belum merupakan mayoritas daripada penduduk, kemenangan sosialisme tidaklah mungkin. Taktik perjuangan kelas yang digunakan Marx seringkali menjadi isu perdebatan di antara pemikir - pemikir Marxisme setelahnya. Taktik tersebut merujuk kepada konsep diktator proletariat.

Konsep tersebut menjadi kunci utama dalam memahami teori Marx berkenaan bentuk masyarakat komunis dan fungsi negara proletariat. Marx dan Engels dalam karyanya *The Communist Manifesto* (1970: 74) mengemukakan *Political Rule of Proletariat* yang menyarankan agar golongan proletariat menaklukkan penguasaan negara agar mereka bisa memanfaatkan kuasa politiknya untuk merampas semua modal dari cengkaman golongan borjuis dan memusatkan semua alat produksi di bawah kekuasaan negara yang dikuasai oleh golongan proletariat sendiri.

Ini dapat dilihat sebagai usaha kaum proletar untuk memusnahkan keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh golongan borjuis. Menurut Marx, proses perubahan sejarah bergerak melalui komunisme primitif, feodalisme, kapitalisme, selanjutnya melalui sejarah sosialisme, dan berakhir dengan komunisme. Setiap transformasi sejarah tersebut dicapai melalui revolusi kaum buruh (proletariat) yang mewakili inspirasi seluruh manusia. Melalui revolusi, kebebasan bersifat 'universal'

akan dapat dicapai oleh kelas buruh, sekaligus mewakili semua umat manusia yang mau melepaskan diri dari belenggu perhambaan (Ismail & Bashir 2012).

Perjuangan untuk mewujudkan revolusi tersebut akan gagal manakala kelas proletariat tidak memiliki kekuasaan dalam negara sebagai 'alat' untuk menggulingkan sistem kapitalisme. Oleh karenanya, Marx sangat menekankan bahwa untuk menghapus kapitalisme, yang menjadi syarat mutlak adalah kaum proletar harus bisa merebut kekuasaan negara lalu menguasainya. Marx tidak sepakat dengan pendirian tokoh anarkisme seperti Michael Bakunin (1814-1876) dan Josep Proudhon (1809-1865) yang menginginkan sistem negara dihapuskan secara total.

Sebaliknya, Marx merasakan bahwa negara yang sangat berguna untuk merealisasikan diktator proletariat, meskipun pada awal negara difungsikan sebagai mekanisme penindasan sesama kelas sosial. Ini kerana Marx meletakkan fungsi negara untuk tujuan peralihan saja terutama usaha yang menjurus ke arah sistem egalitarian yaitu sistem tanpa kerajaan, kelas, dan harta (Marx & Engels 1976: 237).

Walaupun Marx menganggap kekuasaan negara hanya bersifat sementara, tetapi negara digunakan atas kepentingan kelas buruh yang mau memperjuangkan persamaan hak dalam kepemilikan harta (Ismail & Bashir 2012)

Marx mengatakan bahwa sejarah perjuangan manusia merupakan sejarah perjuangan kelas dan negara hanya merupakan alat yang digunakan oleh kelas berkuasa untuk menindas seluruh kelas bawahan. Konsep-konsep dominasi akan berakhir dengan penghapusan sistem kapitalisme, dan itu merupakan tanda bahwa kelas proletariat yang dipelopori oleh kaum buruh telah menang.

Keberhasilan sebuah revolusi dalam perjuangan meruntuhkan pemerintahan lalu menguasainya hanya bergantung kepada sikap diktator proletariat yang di manifestasikan dalam bentuk perjuangan kelas. Sikap diktator itu sendiri diartikan sebagai 'alat' dalam tahap peralihan ke arah pemusnahan semua kelas masyarakat (classless), yaitu transformasi dari masyarakat kapitalis ke masyarakat komunis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Gerakan Buruh Di Indonesia Berdasarkan teori Perjuangan Kelas**

Gerakan kaum buruh di Indonesia berdasarkan teori perjuangan kelas merupakan upaya yang dilakukan bagi kelas buruh (proletat) untuk berjuang membebaskan dirinya dari tekanan kelas borjuis (pengusaha). Berdasarkan teori perjuangan kelas Karl Mark pada dasarnya pada masyarakat industri akan terdiri dari dua kelas yaitu borjuis dan proletar (buruh). Dari kedua kelas tersebut ada

eksploitasi terhadap kaum proletar, di mana buruh diharuskan bekerja dalam rentang waktu yang sangat lama dengan upah yang tidak sebanding dengan hasil kerjanya. Modal (kapital) menurut Marx : tenaga kerja manusia menjadi sebuah komoditi. Para pekerja upahan menjual tenaganya kepada para pemilik tanah, pabrik, dan alat-alat kerja. Seorang pekerja menggunakan sebagian besar waktunya untuk bekerja demi menutupi biaya hidupnya dan keluarganya dengan upah yang sangat minim. Sedangkan sebagian waktunya yang lain digunakan untuk bekerja tanpa mendapat upah, semata-mata hanya mendatangkan nilai lebih untuk para pemilik modal.

Nilai lebih (surplus value) merupakan sumber keuntungan dan sumber kemakmuran bagi kelas pemilik modal (kapitalis). Kondisi buruh di Indonesia juga sama dengan gambaran buruh dalam pemikiran Karl Mark. Buruh di Indonesia mereka juga merupakan pekerja dengan rentang waktu yang cukup panjang dan mendapatkan upah yang tidak sebanding dengan pekerjaan mereka yang terkadang berat dan berisiko. Banyak buruh di Indonesia yang bekerja di pabrik atau pada bangunan yang berisiko tinggi tidak mendapatkan jaminan keselamatan lewat asuransi jiwa dan peralatan pengamanan yang lengkap.

Ada juga buruh anak dan perempuan yang tidak diperhatikan hak-hak kehidupannya, namun tetap

dipekerjakan karena menguntungkan kaum borjuis dan para pemilik modal. Sehingga eksploitasi pada para buruh sangat terasa, banyak para buruh yang penting cukup makan untuk satu hari saja asalkan bisa tetap bisa bekerja.

Dengan semakin kuatnya belenggu penindasan terhadap kelas proletar, Marx, dalam bukunya yang berjudul *Poverty of Philosophy*, menegaskan bahwa skenario eksploitasi kelas telah melahirkan unsur 'antagonisme kelas' yang merangsang keinginan para kaum proletar untuk bebas dari belenggu penindasan. Keinginan untuk bebas dari penindasan tersebut menjadi penggerak utama mereka untuk membentuk sistem sosial yang baru (Ismail & Bashir;2012).

Kelas tersebut akan mendesak perubahan struktur sosial dengan cara-cara kekerasan dan kekejaman seperti perampasan kekuasaan secara revolusi (dengan cepat). Ini merupakan harapan Marx agar kelas proletar menjadi kelas penguasa apabila mampu merampas kekuasaan dan kedudukan kelas borjuis dan memusatkan seluruh peralatan-peralatan produksi dalam tangan kaum proletar.

Sistem sosial baru yang akan didirikan kaum proletar tidaklah sama seperti kelas feodalisme kapitalisme. Kaum proletar, justru sebaliknya, akan mengimplementasikan sebuah kondisi sosial yang tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas merupakan manifestasi dari

perjuangan kaum proletar untuk menghapus jurang pemisah di antara kelas sosial. Dengan terwujudnya kondisi tersebut, sistem kekuasaan tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk menindas suatu golongan masyarakat.

Perjuangan kelas seperti itu hanyalah berakhir melalui penghapusan sistem kapitalisme dan terwujudnya masyarakat tanpa kelas (komunisme). Kaum buruh sebagai kaum proletar untuk memenangkan revolusi sosialis salah satu syarat pokok menurut dalil Marxis adalah mayoritas daripada penduduk harus terdiri atas proletariat. Dan oleh sebab itu, di negeri di mana proletariat belum cukup berkembang dan belum merupakan mayoritas dari pada penduduk.

Kemenangan sosialisme tidaklah mungkin. Maka buruh Indonesia juga menyadari atas kondisi mereka yang sering mendapatkan penindasan dan kesewang-wenangan kaum borjuis dan terkadang didukung oleh pemerintah. Maka para buruh di Indonesia sekarang sudah memiliki perserikatan pekerja yang tujuan utamanya untuk menuntut dan meminta agar pengusaha dan pemerintah memperhatikan hak-hak mereka.

Mulai dari meminta upah yang memadai untuk bisa menghidupi diri dan keluarganya. Menghapuskan penindasan dan eksploitasi pada para pekerja. Mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan. Upaya tersebut terus diupayakan baik melalui dialog dan

langsung bernegosiasi langsung pada pengusaha dan pemerintah maupun lewat aksi-aksi turun ke jalan. Dari dua cara yang dilakukan kelas buruh untuk mendapatkan hak-hak dan memperbaiki kondisi kehidupannya cara yang dirasa masih aktif adalah dengan turun ke jalan. Upaya turun ke jalan dengan mengerahkan massa yang sebesar-besarnya sangat beresiko.

Pengusaha tentu saja akan mengalami kerugian jika para buruh mogok dan kemudian beraksi turun ke jalan. Banyak dampak sosial dan ekonomi jika para buruh turun ke jalan. Maka mengetahui kekuatan tersebut para buruh akan bisa mendapatkan dan meminta tuntutan mereka dipenuhi. Namun aksi demonstrasi kaum buruh di Indonesia saat ini masih dikendalikan oleh pemerintah yang masih merupakan pendukung pengusaha. Tuntutan buruh seperti seperti sekarang untuk menaikkan upah justru telah ditetapkan bahkan aksi buruh tidak merubah keputusan tersebut. Hal ini karena buruh belum mayoritas di Indonesia dan belum dengan cara revolusi yang langsung mengambil kekuasaan negara. Maka kondisi buruh di Indonesia masih harus terus berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan dan kesetaraan.

### **Kesimpulan**

Buruh merupakan kelas bawah yang selalu menjadi korban kepentingan bagi

pengusaha. Hal ini terjadi karena memang di masyarakat seseorang akan mendapatkan status yang tinggi ketika dia memiliki modal dan mampu mengakses sumber daya. Sebaliknya para buruh pekerja di Indonesia seperti buruh pabrik, buruh tambang, buruh bangunan dan lain-lain, mereka memiliki modal tenaga dan keahlian untuk bekerja tapi tidak memiliki modal. Oleh karena itu para buruh sangat menggantungkan kehidupannya pada para pengusaha yang memberi upah pada mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ketergantungan para buruh pada pekerjaan yang mendapatkan upah dari pengusaha menyebabkan mereka secara tanpa sadar dieksploitasi.

Hal ini terjadi karena jumlah jam kerja dan pengorbanan untuk bekerja terkadang tidak sebanding dengan upah yang memadai. Bahkan banyak buruh yang bekerja tanpa mendapatkan perlindungan dan keamanan karena tanpa alat yang memadai sedangkan pekerjaan itu beresiko. Oleh karena itu pandangan Karl Mark untuk memperjuangkan kelas merupakan kritik sosial dari melihat kehidupan para buruh dalam kondisi kehidupannya sehari-hari.

Kondisi buruh di Indonesia saat ini masih terbelenggu dan ditekan oleh kelas atas yaitu pengusaha dan pemerintah. Buruh harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan dalam relasi antar kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, I. & Bashir, M. Z. K., (2012). Karl Marx dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial. *International Journal of Islamic Thought*, Vol.1, pp.28-33
- Kristeva, N. S. S., (2011). *Negara Marxis dan Revolusi Proletariat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Marx, K. (1955). *The Poverty of Philosophy*. Brussels : Progress Publishers
- Soepomo, I. (1987). *Hukum Perburuhan Jakarta* : Djambatan
- Suhelmi, A. (2001). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Syam, F. (2010). *Pemikiran Politik Barat : Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Yulianto, T. (2012). Hukum Sebagai Sarana Untuk Melindungi Pekerja/Buruh Dalam Hubungan Industrial. *Jurnal Orbith*. 8(2) pp.104-108

Internet

- [www.kompas.com](http://www.kompas.com)  
[www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)  
[www.vivanews.com](http://www.vivanews.com)

Dokumentasi

- Badan Pusat Statistik. 2013 . Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia tahun 2013. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

How to Cite Articiel :

Syafitri, R. (2019). Gerakan Buruh Di Indonesia Dalam Analis Teori Perjuangan Kelas Karl Mark. *Jurnal Masyarakat Maritim*, 3(2), 36-49.